

## **POLITIK LINGKUNGAN KRITIS DI PAPUA: STUDI KASUS KOTA MERAUKE**

**Lambertina Rumkorem**  
[rumkoremlambertina1@gmail.com](mailto:rumkoremlambertina1@gmail.com)  
**Universitas Kristen Indonesia**

### **ABSTRAK**

Politik lingkungan di Papua, khususnya di Kota Merauke, memperlihatkan relasi kekuasaan yang kompleks antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Merauke diposisikan sebagai wilayah strategis dalam agenda pembangunan nasional, terutama melalui pengembangan pertanian dan perkebunan skala besar. Namun, pembangunan tersebut memicu berbagai persoalan ekologis dan sosial, seperti alih fungsi hutan, degradasi lingkungan, konflik agraria, serta marginalisasi masyarakat adat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik lingkungan di Merauke menggunakan pendekatan politik lingkungan kritis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap buku, artikel jurnal, laporan organisasi masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa politik lingkungan di Merauke ditandai oleh ketimpangan kekuasaan, dominasi negara dan korporasi, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan di Merauke memerlukan perubahan paradigma pembangunan menuju pendekatan yang berkeadilan ekologis, partisipatif, dan berbasis pengakuan hak masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Politik Lingkungan, Masyarakat Adat, Pembangunan Skala Besar.

### **PENDAHULUAN**

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan krusial dalam pembangunan di Indonesia, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua. Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal. Kota Merauke menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pembangunan berskala besar membawa dampak sosial-ekologis yang signifikan.

Merauke memiliki kondisi ekologis yang khas, terdiri dari savana luas, hutan rawa, lahan gambut, sungai-sungai besar, dan wilayah pesisir. Ekosistem tersebut merupakan ruang hidup masyarakat adat, khususnya suku Marind, yang selama berabad-abad menggantungkan kehidupan pada alam melalui sistem berburu, meramu, dan pertanian tradisional. Bagi masyarakat adat, tanah dan hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Merauke mengalami perubahan besar akibat masuknya proyek-proyek pembangunan yang berbasis eksploitasi lahan. Pembangunan ini sering dibenarkan melalui narasi kepentingan nasional seperti ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, narasi tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga marginalisasi masyarakat adat.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan politik lingkungan kritis untuk menganalisis bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan ekonomi membentuk pengelolaan lingkungan di Merauke serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan keberlanjutan ekologis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan isu politik lingkungan di Papua dan Merauke. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji relasi antara aktor-aktor politik, kebijakan pembangunan, dan dampak sosial-ekologis yang muncul.

Pendekatan politik lingkungan kritis digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kepentingan memengaruhi pengelolaan sumber daya alam serta posisi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Sosial dan Ekologis Kota Merauke**

Secara ekologis, Merauke merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan sistem lingkungan yang relatif rentan. Masyarakat adat memanfaatkan alam secara berkelanjutan melalui pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Namun, perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran telah mengganggu keseimbangan tersebut. Pembukaan hutan dan savana untuk kepentingan investasi menyebabkan degradasi lingkungan, menurunnya kualitas air, serta hilangnya sumber pangan tradisional masyarakat adat.

### **Negara dan Arah Politik Lingkungan**

Negara memainkan peran dominan dalam menentukan arah pengelolaan lingkungan di Merauke. Melalui kebijakan dan regulasi, negara membuka ruang bagi investasi skala besar dengan dalih pembangunan dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, negara tidak bertindak sebagai pelindung lingkungan dan masyarakat adat, melainkan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa politik lingkungan di Merauke bersifat top-down dan minim partisipasi masyarakat lokal. Keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh aktor di luar Papua, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat sering diabaikan.

### **Kolonialisme Ekologis dalam Pembangunan Merauke**

Konsep kolonialisme ekologis relevan untuk menjelaskan dinamika pembangunan di Merauke. Tanah adat direduksi menjadi komoditas ekonomi, sementara nilai-nilai budaya dan spiritual diabaikan. Proses ini menciptakan ketimpangan struktural antara aktor yang memiliki kekuasaan dan masyarakat adat sebagai pihak yang paling terdampak.

Kolonialisme ekologis di Merauke tercermin dalam hilangnya kontrol masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta meningkatnya ketergantungan terhadap sistem ekonomi eksternal.

### **Ketidakadilan Lingkungan dan Dampak Sosial**

Ketidakadilan lingkungan di Merauke terlihat dari distribusi dampak pembangunan yang tidak merata. Masyarakat adat menanggung risiko lingkungan berupa kerusakan ekosistem dan hilangnya mata pencaharian, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh negara dan korporasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan di Merauke juga merupakan persoalan keadilan sosial.

### **Resistensi Masyarakat Adat dan Politik Ekologi Lokal**

Meskipun berada dalam posisi yang lemah, masyarakat adat Merauke tidak sepenuhnya pasif. Berbagai bentuk resistensi muncul sebagai upaya mempertahankan hak

atas tanah dan lingkungan hidup. Resistensi ini mencerminkan adanya politik ekologi dari bawah yang menantang dominasi negara dan korporasi.

### **Implikasi Kebijakan dan Masa Depan Lingkungan Merauke**

Analisis politik lingkungan di Merauke menunjukkan perlunya perubahan paradigma pembangunan. Kebijakan lingkungan harus mengedepankan prinsip keadilan ekologis, pengakuan hak masyarakat adat, dan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Tanpa perubahan tersebut, konflik lingkungan dan sosial di Merauke berpotensi terus berlanjut.

### **KESIMPULAN**

Politik lingkungan di Kota Merauke memperlihatkan relasi kekuasaan yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat adat. Pendekatan politik lingkungan kritis menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan memerlukan perubahan paradigma pembangunan menuju pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pengakuan hak masyarakat adat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Oxford: Wiley-well.
- Walhi Papua. (2020). *Laporan Konflik Lingkungan di Papua Selatan*. Jayapura.
- Yance Arizona. (2019). Politik Agraria dan Masyarakat Adat di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 123–140.